

Prof. DEDDY MULYANA, M.A., Ph.D.
Dr. SOLATUN, M.Si.



METODE PENELITIAN KOMUNIKASI

Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif
Dengan Pendekatan Praktis

Prof. DEDDY MULYANA, M.A., Ph.D.
Dr. SOLATUN, M.Si.

METODE PENELITIAN KOMUNIKASI

**Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif
Dengan Pendekatan Praktis**



PENERBIT **PT REMAJA ROSDAKARYA** BANDUNG

RR.KO0073-02-2008

METODE PENELITIAN KOMUNIKASI
Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis

Penulis:

Lely Arrianie; Engkus Kuswarno; Deddy Mulyana;
Thomas J. Schmid & Richard S. Jones; Ronny E. Turner &
Charles Edgley; Donald W Ball; Patricia McCullough;
Karin Wahl-Jorgensen; Alison Shaw; Santi Indra Astuti; Solatun

Editor:

Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. & Dr. Solatun, M.Si.

Layout:

Rahmat Guswandi

Desainer sampul: Iman Taufik

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**
Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40, Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287, Faks. (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
Website: www.rosda.co.id

Anggota Ikapi

Cetakan pertama, Maret 2007
Cetakan kedua, November 2008

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis
Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung

ISBN 979-692-818-3

Untuk para pecinta pengetahuan
yang tak menggadaikan kehormatan
demi jabatan dan kekayaan

Daftar Isi

DEDDY MULYANA

Penelitian Kualitatif vs Penelitian Kuantitatif:

Prolog — 1

- Apa Perbedaan Mendasar antara Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif? — 4
- Apakah Penelitian Kualitatif Ilmiah? — 11
- Apakah Metodologi Kualitatif Memiliki Standar yang Baku? — 14
- Tentang Buku Ini — 19

LELY ARRIANIE

Sandiwara di Senayan:

Studi Dramaturgis Komunikasi Politik di DPR RI

- Konteks dan Fokus Penelitian — 25
- Melacak Studi Komunikasi Politik — 27
- Komunikasi Politik sebagai Interaksi Simbolik — 32
- Komunikasi Politisi DPR sebagai Dramaturgi — 37
- Menelusuri Komunikasi Politisi — 46
- Realitas Panggung Politik DPR RI — 55
- Membahas Panggung Politik dan *Impression Management* Politisi DPR RI — 78

ENGKUS KUSWARNO

Manajemen Komunikasi Pengemis

- Latar Belakang — 87

- Fokus Penelitian — 89
- Teori dan Metode Penelitian — 90
- Prosedur Penelitian — 94
- Hasil Penelitian — 101
- Pembahasan — 120

DEDDY MULYANA

Multiplisitas Identitas Etnik:

Orang Indonesia di Melbourne

- Pendahuluan — 137
- Tujuan Penelitian — 139
- Kerangka Teoretis — 139
- Metode Penelitian — 141
- Temuan Penelitian — 142
- Kesimpulan — 158

THOMAS J. SCHMID DAN RICHARD S. JONES

Pemendaman Identitas:

Transformasi Identitas dalam Penjara dengan Penjagaan yang Ketat

- Identitas Sebelum Dipenjarakan — 165
- Pengisolasian Diri — 166
- Pengelolaan Kepribadian Ganda — 168
- Dialektika Identitas — 175
- Identitas Setelah Dipenjarakan — 177
- Model Pemendaman Identitas — 179

RONNY E. TURNER DAN CHARLES EDGLEY

Kematian Sebagai Pertunjukan:

Dramaturgi Pemakaman di Amerika Serikat

- Bagaimana Pemakaman Diarahkan sebagai Sebuah Pertunjukan — 186
- Jarak Peran antara yang Suci dan yang Kotor — 187
- Wilayah Panggung Belakang: Tempat Persiapan dan Latihan — 188

Sandiwara di Senayan

Studi Dramaturgis

Komunikasi Politik di DPR RI

Lely Arrianie

Konteks dan Fokus Penelitian

Reformasi telah memberikan posisi tawar yang jauh lebih dominan kepada politisi dibandingkan dengan masa Orde Baru. Politisi unjuk gigi dengan kedudukan, peran dan fungsinya. Ini terjadi pada politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, juga di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten dan kota di seluruh penjuru tanah air.

Kedudukan politisi dalam sebuah lembaga politik yang menjalankan fungsi politik (termasuk fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan perekrutan) mengharuskan politisi terampil berkomunikasi sebagai sarana dalam pembangunan politik. Tiap politisi seyogianya mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya secara bijak, santun, dan arif.

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi politik mereka, politisi harus menyadari bahwa komunikasi politik memiliki arti yang sangat luas, termasuk penggunaan gambar, gerakan, isyarat, pakaian, maupun dalam bentuk perlambangannya lainnya yang berlaku di panggung politik, bukan sekadar pembicaraan.

Setiap aktivitas politik yang mempertukarkan pesan-pesan politik dan dilakukan oleh aktor politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan berbagai opini tentang peran mereka sebagai pelaku komunikasi politik, terutama dalam memaknai perannya di panggung politik. Peran politik tersebut mungkin akan dimaknai secara gamang oleh mereka yang muncul secara tiba-tiba sebagai selebritis politik.

Asumsi bahwa politisi mengalami *culture shock* bukanlah mengada-ada. Fenomena itu terjadi karena mereka yang sebelumnya tidak dikenal, tidak mempunyai pekerjaan tetap, tiba-tiba menjadi politisi yang bersinar di media, mendapatkan gaji besar; atau mereka yang tidak bisa berpolitik, tiba-tiba pula dimintai komentarnya tentang politik. Mereka tidak hanya memborong pembicaraan tentang politik melainkan juga tentang masalah sosial, budaya, ekonomi, bahkan pertahanan dan keamanan yang pendapatnya didengar banyak orang, disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi. Kondisi demikian tampak menciptakan panggung politik yang begitu cair dan dinamis. Di dalamnya ada dagelan, ironi dan bahkan tragedi, yang semuanya bak drama atau sandiwara.

Studi ini menggunakan paradigma interpretif (fenomenologis), khususnya pendekatan interaksi simbolik dan dramaturgis, yang masih belum banyak dilakukan untuk mengkaji fenomena komunikasi politik. Di antara yang sedikit itu, ini adalah salah satu yang akan mengkaji dunia politik DPR lengkap dengan dinamika interaksi yang sangat cair dan sarat dengan pengelolaan kesan (*impression management*).

Masalah penelitian ini dirumuskan dan dinyatakan ke dalam dua pertanyaan pokok:

- Bagaimana politisi menampilkan dan memaknai aktivitas politik mereka di panggung politik DPR?
- Apa motif politisi DPR dan bagaimana *impression management* mereka dalam melakukan pertukaran pesan-pesan politik di DPR?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan faktual, mengungkapkan berbagai gejala yang timbul sepanjang proses pertukaran pesan-pesan politik oleh para politisi di DPR, serta mengembangkan konsep, model teoretis dan pendekatan komunikasi politik yang berkaitan dengan peran politisi sebagai komunikator politik. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang apa, mengapa dan bagaimana mereka melakukan komunikasi politik, khususnya pengelolaan kesan di panggung politik.

Melacak Studi Komunikasi Politik

Komunikasi politik menjadi kajian yang menarik perhatian para sarjana komunikasi dan sarjana politik, para aktivis, politisi maupun profesional dalam bidang komunikasi dan politik. Komunikasi politik merupakan disiplin ilmu yang masih baru. Jalaluddin Rakhmat, mengutip Dan Nimmo dalam bukunya *Handbook of Political Communication*, "di Amerika sekalipun komunikasi politik masih mencari bentuk, *as fields of investigations go, political communication is obviously still in infancy*" (2000:vii). Namun penelaahan komunikasi dan politik sekaligus pemanfaatan komunikasi untuk kepentingan politik sebetulnya telah berlangsung lama. Salah seorang perintisnya adalah Harold D. Lasswell yang pada tahun 1927 menulis buku *Propaganda Technique in the World War*.

Objek material komunikasi politik menurut Sartori (dalam Rush dan Althoff, 1971:46) adalah: "dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi" sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gurevith dan Blumler (1977:72) yang mengemukakan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu: 1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya, 2. Institusi media dalam aspek politiknya, 3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi, dan 4. Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik juga diakui oleh Greber (1981:23): "Sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik". Ia menambahkan bahwa "ketika kita menjelaskan bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosa kata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, *setting* di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan".

Sebagai komunikator politik politisi berada pada posisi strategis untuk memainkan peran politik dalam suatu *setting* politik tertentu. Menurut Nimmo (1993:72):

Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Mengkaji komunikasi politik yang dilakukan oleh para komunikator politik di DPR atau DPRD merupakan hal menarik. Pekerjaan utama politisi di lembaga legislatif adalah sebagai aktor politik yang memerankan diri untuk dan atas

nama rakyat. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa seringkali politisi justru bertindak hanya atas nama kelompok partai yang mengantarkannya sebagai wakil rakyat, bahkan adakalanya untuk kepentingan pribadi. Maka terjadilah ketidakajegan, karena mereka menganggap dirinya sebagai orang besar yang mewakili kepentingan diri dan kelompoknya sendiri, padahal mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Nimmo (1989:17): "Kebanyakan politisi mendapat kesulitan besar untuk bisa dikenal bahkan untuk mempunyai citra". Mungkin karena itu pulalah maka berbagai upaya dilakukan politisi untuk memperoleh citra positif tetapi dengan dan atau tanpa disadari menggiringnya ke arah pembentukan citra yang justru negatif. Dalam konteks inilah, maka relevan untuk meneliti bagaimana para politisi DPR melakukan peran politik mereka lengkap dengan segala atribut yang melekat sebagai konsekuensi dari peran politik mereka di panggung politik.

Dalam komunikasi politik terdapat adagium bahwa "politik adalah pembicaraan" (Suwardi,1995:12). Pembicaraan tersebut menggunakan lambang-lambang tertentu demi tujuan dan kepentingan politik, baik lambang verbal ataupun lambang nonverbal. Meskipun setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, kita tidak lagi mendengar koor "Setuju" yang *mbalelo* ketika para wakil rakyat mengikuti sidang-sidang di DPR, kita masih menyaksikan di televisi wajah mereka yang terkantuk-kantuk ketika mengikuti sidang. Apakah ini mengisyaratkan ketidakmampuan mereka untuk menolak gagasan yang tidak sejalan dengan pikiran dan kepentingan politik mereka sendiri (meskipun sesuai dengan kepentingan rakyat?). Pergeseran perilaku politik tampaknya telah terjadi. Panggung politik DPR kadangkala dipenuhi muatan untuk mempertahankan ego dan kepentingan kelompok sang politisi. Ini terjadi karena: "lembaga-lembaga politik kita sesungguhnya tengah mengalami ketidakpercayaan rakyat" (Ali,1999:vi)

Dalam konteks terjadinya pergeseran peran dan perilaku politik para politisi itulah pendekatan dalam penelitian ini

difokuskan, yakni untuk menelaah perilaku mereka sebagai aktor politik. Bukankah berdasarkan statusnya para anggota DPR diharapkan dapat memainkan perannya secara benar, tidak hanya memainkan peran politik yang dipersiapkan melalui skenario kelompoknya, melainkan juga sesuai dengan tuntutan rakyat yang mereka wakili.

Komunikasi Politik sebagai Interaksi Simbolik

Oleh karena perilaku aktor politik di DPR begitu dinamis dan cair, studi tentang perilaku politik mereka dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis (Schutz, 1972), interaksi simbolik (Mead, 1934) dan dramaturgis (Goffman, 1959).

Perilaku aktual manusia haruslah dikaji berdasarkan orientasi subjektif mereka sendiri. Alfred Schutz (1972) melalui karya klasiknya *The Phenomenology of the Social World*, tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi dengan sosiologi atas arus pengalaman (*stream of experience*) manusia tentang dunia. Memakai apa yang dinamakannya piranti-piranti filsafat fenomenologis Edmund Husserl, Schutz menganggap manusia adalah makhluk sosial. Kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial yang menurutnya berlangsung dalam dua cara: *pertama*, kesadaran untuk mengandaikan begitu saja kegiatan orang lain yang dialami bersama; *kedua*, kesadaran memakai tipe-tipe yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu yang ada.

Sejalan dengan Schutz, Irwin Deutscher (1973:38) mengatakan bahwa: "kaum fenomenologis memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri". Sedangkan Jack Douglas (1970:ix) mengemukakan:

Kekuatan yang mendorong manusia sebagai *human being* dan bukan manusia sebagai *human bodies* (manusia yang

hanya dipandang dari sisi jasmaninya saja) merupakan bahan yang bermakna. Kekuatan-kekuatan itu berupa wawasan, perasaan dan motif yang bersifat batiniah.

Weber, seperti dikutip Doyle Paul Johnson (1986:42) mengemukakan:

Apa yang diminta adalah 'empati' – kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu. Konsep ini menunjuk pada konsep mengambil peran yang terdapat dalam interaksi simbolik.

Pentingnya analisis perilaku aktual seseorang menurut perspektif orang itu sendiri pada dasarnya juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Weber bahwa: "kegagalan teoretisi sosial memperhitungkan arti-arti subjektif individu serta orientasinya, dapat membuatnya memasukkan orientasi nilainya sendiri dalam memahami perilaku orang lain" (Johnson,1986:43). Sementara itu menurut Douglas:

Realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya atau menghayati dunianya, oleh sebab itu pula maka kaum fenomenologis dalam mendekati persoalan dan mencari jawaban menuntut jenis riset dan metodologi yang berbeda. Kaum fenomenologis berusaha mencari pemahaman melalui metode-metode kualitatif. Seperti observasi partisipan, *open-ended interviewing* dan dokumen perorangan. Metode ini mencari data deskriptif yang memungkinkan para fenomenologis memahami dunia sebagaimana sang subjek memahaminya (Douglas,1970:17).

Dengan demikian fenomenologi sesungguhnya adalah sebuah pendekatan yang diharapkan mampu mengungkapkan sedetail mungkin objek yang dikaji dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. Dalam studi ini, adalah

Ada faktor-faktor emosi dan kebiasaan dalam perilaku manusia. Pada tingkat tertentu kita sangat bergantung pada faktor-faktor ini dalam tindakan kita. Kita tidak bebas karena kebebasan selalu ada batasnya. Meskipun kita bebas menggunakan simbol-simbol, kita juga terpengaruh oleh emosi atau kebiasaan. Bahkan, ketika seseorang tidak mampu mengatasi situasi secara efektif, tidak mampu mengambil peran, tidak mampu bekerjasama berkenaan dengan situasi-situasi yang kompleks, bahkan tidak mampu berkomunikasi secara efektif, maka seseorang akan selalu dikejutkan dengan hal-hal yang seseorang lakukan termasuk ketika kita menyadari bahwa kita kreatif, impulsif dan spontan sebagai aku (*the I*). Artinya, kebebasan manusia selalu akan dibatasi dan terbatas oleh bahasa maupun simbol-simbol kita yang lain. Kita hanya bisa bebas di dalam sistem simbolik kita sendiri.

Prinsip-prinsip lain yang digunakan oleh ahli interaksi simbolik dalam riset ilmiah adalah mengamati dan mendeskripsikan subjek penelitian dalam *setting* nyata, yakni bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri dalam situasi yang harus dilalui. Deskripsi semacam ini tidak impresionistik, namun dibuat sehati-hati, sekritis, sesistematis, dan seobjektif mungkin. Di samping itu juga peneliti memiliki peluang untuk mendiskusikan riset tersebut secara terus-menerus dengan ilmuwan lain, bahkan jika diperlukan, menegosiasikannya dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian mereka.

Para ahli interaksi simbolik berpendapat bahwa tindakan ada dua macam, yaitu tindakan nyata dan tersembunyi. Tindakan tersembunyi berarti memasuki pikiran manusia. Hal ini berarti bahwa peneliti berupaya memahami tingkah laku orang yang mendefinisikan situasi aktual, bagaimana mereka mengembangkan, menggunakan dan mengubah perspektif, mengambil peran, memecahkan masalah, berbicara dengan diri sendiri dan mengambil suatu keputusan. Untuk mengerti tindakan tersembunyi berarti kita perlu mempelajari pikiran sebagai tindakan daripada pikiran sebagai isi.

Bagi seorang ilmuwan itu sendiri, untuk mengerti sesuatu, diperlukan kemampuan menempatkan diri sendiri pada posisi individu atau kelompok (Blumer; 1969:51).

Komunikasi Politisi DPR sebagai Dramaturgi

Perspektif dramaturgis dari Erving Goffman, sebenarnya merupakan salah satu model pendekatan interaksi simbolik selain teori penjurukan dan etnometodologi (Mulyana, 2001:68). Goffman begitu terilhami oleh teori interaksi simbolik dari George H. Mead yang sering dianggap sebagai Bapak Interaksionisme Simbolik. Menurut Mead: "Cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat pikiran (*mind*) dan dirinya (*self*) menjadi bagian dari perilaku manusia yaitu bagian interaksinya dengan orang lain". Bahkan menurut Mead: "Sebelum seseorang bertindak, ia membayangkan dirinya dalam posisi orang lain dengan harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa yang diharapkan orang itu".

Intinya, hanya dengan menyetarakan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka interaksi menjadi mungkin. Semakin mampu seseorang mengambil alih, atau membatinkan perasaan-perasaan sosial semakin terbentuk identitas atau kediriannya. Karena itulah lewat pendekatannya terhadap interaksi sosial, Goffman sering dianggap sebagai salah satu penafsir 'teori diri' dari Mead dengan menekankan sifat simbolik dari manusia (Mulyana, 2001:106). Goffman sering dianggap ahli teori yang sangat memperhatikan analisis interaksi manusia. Ia menganggap individu (bukan struktur yang lebih besar) sebagai satuan analisis. Untuk menjelaskan tindakan manusia, Goffman memakai analogi drama dan teater. Hal itulah yang menjadikannya sebagai seorang dramaturgis. Melalui karyanya yang berjudul *The Presentation of Self in Everyday life* (1959) Goffman menyediakan dasar teori mengenai bagaimana individu tampil di dunia sosial.

Kerangka ini terus dipakai Goffman dalam banyak karya lain yang dihasilkannya.

Goffman tidak memusatkan perhatiannya pada struktur sosial. Ia lebih tertarik pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama (*co-presence*). Menurut Goffman: "Biasanya terdapat suatu arena kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan individu-individu yang saling mempengaruhi tindakan mereka satu sama lain ketika masing-masing berhadapan secara fisik". Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin (1959:15). Goffman menyaksikan bahwa individu dapat menyajikan suatu pertunjukan (*show*) bagi orang lain, tetapi kesan (*impression*) yang diperoleh khalayak terhadap pertunjukan itu bisa berbeda-beda. Seseorang bisa sangat yakin terhadap tindakan yang diperlihatkan kepadanya, tetapi dapat pula bersikap sinis terhadap pertunjukan itu.

Menggunakan metafor teater, Goffman (1959) membagi kehidupan sosial ke dalam dua wilayah yaitu:

- Wilayah depan (*front Region*), yaitu tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan. Wilayah ini disebut juga 'panggung depan' (*front stage*) yang ditonton khalayak.
- Wilayah belakang (*back region*), yaitu tempat untuk mempersiapkan perannya di wilayah depan, disebut juga 'panggung belakang' (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan.

Pada wilayah depan para pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan *image* terhadap pertunjukannya yang skenarionya sudah diatur sedemikian rupa dan berbeda jauh dengan apa yang ada di wilayah belakang. Pada bagian lain penampilan individu secara teratur berfungsi secara umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu, dikenal juga *setting* dan

personal front untuk kemudian dibagi lagi menjadi penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*).

Menggunakan komunikasi politik di DPR sebagai contoh, komunikasi politik sehari-harinya terjadi dalam suatu *setting* berupa lembaga perwakilan dengan perlengkapan sidang dan sebagainya. Dalam hal ini penampilan dibatasi sebagai 'stimuli yang memberi tahu kita status sosial para pelaku'. Jas lengkap dengan dasi atau pakaian PSH dan PSL sertaencana anggota dewan, dapat berfungsi sebagai stimuli yang membedakan anggota dewan dengan rakyat lainnya. Sementara itu 'gaya' merujuk kepada stimuli yang mengingatkan khalayak akan peranan interaksi (*interaction role*) yang diharapkan dimainkan oleh sang aktor. Misalnya masyarakat berharap bahwa anggota DPR memiliki sikap percaya-diri, jujur dan mau mendengarkan keluhan rakyat yang mereka wakili.

Berdasarkan pandangan dramaturgis, seseorang cenderung mengetengahkan sosok-diri yang ideal sesuai dengan status perannya dalam kegiatan rutinnnya. Seseorang cenderung menyembunyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya. Bagian dari sosok-diri yang diidealisasikan melahirkan kecenderungan si pelaku untuk memperkuat kesan bahwa pertunjukan rutin yang dilakukannya serta hubungan dengan penonton memiliki sesuatu yang istimewa sekaligus unik.

Ketika politisi berinteraksi dengan sesama politisi lainnya atau dengan masyarakatnya, terjadi sebuah pengelolaan kesan oleh politisi yang diharapkan tumbuh dari orang lain terhadap politisi tersebut (misalnya agar politisi dianggap cerdas, berwibawa, berdedikasi, dsb.). Akan tetapi di belakang layar, perilaku mereka bisa sangat berbeda. Pada saat rehat sidang DPR misalnya, politisi dapat melepaskan jas dan mengendurkan dasinya, duduk santai dan bercengkerama dengan politisi lainnya, atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain, semisal pengusaha, yang boleh jadi bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Goffman (1959) mengisyaratkan bahwa kegiatan rutin jarang dilakukan sendirian. Goffman menggunakan istilah *team* sebagai sejumlah individu yang bekerjasama mementaskan suatu *routine*. Dalam panggung politik tim itu dapat berupa seorang politisi dengan beberapa anggota lain dari fraksinya, atau seorang ketua komisi dengan beberapa orang anggota komisi lainnya. Beberapa elemen dasar dari pertunjukan tim ini dikemukakan oleh Goffman (1959:88) antara lain:

Pertama, saat suatu tim pertunjukan sedang berjalan, sesuatu dapat mengganggu atau menyimpang dari setiap anggota tim pertunjukan itu. Setiap peserta tim harus bergantung pada tindakan dan perilaku mitranya, sedangkan temannya harus bersikap demikian juga kepadanya. *Kedua*, bila para anggota tim itu harus bekerja sama untuk mempertahankan suatu definisi atas situasi tertentu di hadapan penonton, para anggota tim akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesan tersebut. Oleh karena itu para peserta tim, sesuai dengan frekuensi mereka bertindak sebagai suatu tim serta sejumlah masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kesan, cenderung diarahkan oleh ketentuan yang dinamakan dengan kebiasaan.

Oleh sebab itulah diperlukan langkah protektif yaitu 'kebijaksanaan', agar individu yang bukan pemain rela menghindari daerah di mana mereka tidak diundang yaitu panggung belakang. Berkaitan dengan hal ini, suatu analisis Goffman yang menarik adalah pengakuannya akan banyaknya cara di mana orang bekerjasama dalam melindungi berbagai tuntutan satu sama lain berkaitan dengan kenyataan sosial yang tengah mereka usahakan untuk dipentaskan maupun identitas yang mereka coba tampilkan. Menurut Goffman (dalam Johnson, 1986:43), "hal ini penting, karena hakikat kenyataan sosial yang dirancang itu pada dasarnya mudah

dikritik dan kesan-kesan mengenai diri yang mereka ciptakan dapat dengan mudah diganggu dan berantakan".

Dramaturgi memperlakukan *self* sebagai produk yang ditentukan oleh situasi sosial, paling tidak ini mirip dengan apa yang disebut skenario yang telah dipersiapkan oleh sutradara bagi para pemainnya di atas panggungnya sendiri. Karena itu menurut Goffman (1959): "Selama pertunjukan berlangsung tugas utama aktor ini adalah mengendalikan kesan yang disajikan selama pertunjukan. Perbedaan pendapat di antara para anggota tim tidak hanya melumpuhkan kesatuan bertindak akan tetapi juga membuat kikuk realitas yang mereka wakili". Dalam konteks ini, kesetiaan, disiplin dan kewaspadaan merupakan tiga atribut esensial untuk suksesnya suatu tim. 'Kesetiaan dramaturgis' berarti kewajiban moral untuk mendukung pelaksanaan peran. 'Disiplin dramaturgis' berarti selalu berpegang pada bagian yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh pertunjukan sendiri dan 'kewaspadaan dramaturgis' berarti menggunakan metode yang tepat untuk menyajikan pertunjukan sesuai dengan skenarionya.

Konsep *impression management* sebenarnya dapat diperluas lewat media massa, terutama televisi. Mulyana (1999:90) menyatakan bahwa: "Pengelolaan kesan lewat televisi khususnya, baik melalui pemberitaan, acara khusus atau bahkan iklan sangatlah penting. Karena televisi dapat melipatgandakan pengaruh *impression management* itu". Pengelolaan kesan politisi yang mencitrakan diri sebagai orang yang sangat terhormat di panggung politik memang telah makin mempengaruhi kesan masyarakat terutama terhadap fenomena yang dilakukan politisi di panggung politik akhir-akhir ini. Banyaknya pertemuan di luar gedung dan pertemuan lain yang dinyatakan sebagai pertemuan setengah kamar yang kemudian dilakukan politisi, makan di restoran mewah, menginap di hotel berbintang, bahkan sebagian hidup dan bergaya bak selebritis, juga sampai melakukan kunjungan ke luar negeri adalah *setting* lain yang

menarik untuk dikaji. Juga ketika mereka muncul dalam pertemuan keagamaan atau bahkan menjadi pembicara di forum seminar bergengsi.

Sebagai komunikator politik, politisi harus memahami bidang kerja mereka. Tetapi sekeras apa pun upaya yang mereka lakukan, pencitraan terhadap kemampuan politik politisi sedikit banyak ditentukan oleh menarik tidaknya masalah yang mereka tangani dan ekspose media terhadap permasalahan tersebut. Tidak sedikit politisi yang akrab dengan para jurnalis yang sehari-hari nongkrong di gedung DPR. Sedikit banyak hal ini ternyata menentukan *rating* popularitas mereka di mata komunikator politik yang lain. Ini adalah satu upaya politisi mencitrakan dirinya di mata publik dengan komunikasi tatap-muka, dengan bahasa verbal dan nonverbal dan dengan memanfaatkan media, sekaligus mengharapkan umpan balik positif bagi pencitraan politisi di mata konstituennya.

Kajian atas politisi sebagai komunikator politik ini menjadi menarik manakala mereka diidentikkan dengan kelompok sosial yang tidak abadi. Pendekatan Goffman terhadap hubungan tatap-muka yang terjadi di jalan, bioskop dan berbagai tempat pertemuan lain dan bagaimana aktor menyajikan, menggambarkan penyajian 'diri' nya ke dalam situasi non-kelembagaan, merupakan pisau analisis yang juga cocok untuk membedah dinamika komunikasi politik para anggota DPR. Hal ini sejalan dengan analisis Goffman dalam bukunya *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction* (1961), khususnya mengenai bagaimana orang mengendalikan kesan yang diberikan ketika berinteraksi dengan orang lain. *Encounters* merupakan studi pengelolaan kesan dalam kelompok-kelompok yang tidak berusia panjang. Bukankah dalam gelanggang atau panggung politik seperti DPR dan atau DPRD tergabung politisi yang berasal dari berbagai partai politik yang perannya dibatasi oleh waktu dari pemilu ke pemilu. Begitu juga peran komisi atau fraksi maupun panitia khusus pun tidak lebih panjang dari usia

pemilu itu sendiri. Bahkan 'kesetiaan' politisi kepada politisi lain dari partai yang sama sekalipun, tidak pernah abadi, bergantung pada sejauh mana kepentingan mereka terakomodasi. Goffman dalam bukunya *Behavior in Public Places: Notes on The social Organization of Gatherings* (1963a) menyatakan bahwa justru banyak orang berinteraksi dalam pertemuan singkat itu. Di sini pun, menurut Goffman, orang tetap berhati-hati mengendalikan kesan yang diberikan kepada orang lain yang terlibat dalam situasi singkat tersebut. Orang berupaya agar sedapat mungkin, aib mereka, sekecil apa pun, tidak terlihat oleh orang lain.

Aib (*stigma*) yang dikaji Goffman melalui kelompok orang cacat yang sekaligus merupakan pengujian diri yang problematik tentang orang-orang cacat yang tidak memperoleh penerimaan sosial sebagaimana mestinya, karena kekurangannya langsung terlihat, diukur berdasarkan penerimaan sosial. Ternyata, struktur institusi dan situasi sangat berperan. Dalam bukunya *Stigma: Note on The Management of Spoiled Identity* (1963b) Goffman menjelaskan pengendalian kesan dari mereka yang direndahkan atau yang dapat direndahkan. Namun yang terkait dengan penelitian ini adalah kajian Goffman tentang mereka yang kekurangannya tidak terlihat secara langsung untuk mengikuti standar penerimaan sosial. Inilah hal yang paling menarik, unik dan argumentatif jika kita kaitkan dengan interaksi politisi yang tentunya berasal dari berbagai partai politik yang secara ideologis berbeda. Sebagian politisi DPR (1999-2004) pun awalnya berasal dari kelas yang 'inferior' (dibandingkan dengan kelas orang-orang dari lembaga eksekutif berdasarkan tingkat pendidikan mereka misalnya). Sadar dengan 'kekurangan' mereka dari segi pengalaman politik dan pendidikan, mereka boleh jadi merasa gamang ketika tiba-tiba harus memainkan peran penting di Senayan.

Goffman mengemukakan bahwa cara individu menangani informasi dapat menunjukkan kelemahan mereka masing-masing. Nyatanya para politisi DPR dihadapkan pada

Tabel 1. Pengelompokan Informan Berdasarkan Tipologi Komunikator Politik

INFORMAN	KOMUNIKATOR POLITIK			TOTAL
	POLITISI	PROFESIONAL	AKTIVIS	
Politisi (Anggota DPR RI 1999 – 2004)	19	-	-	19
Menteri pada Kabinet Gotong Royong	4	-	-	4
Mantan Politisi DPR RI/ Pimpinan Partai Politik	2	-	-	2
Aktivis Organisasi Pemuda dan LSM	-	-	4	4
Pengamat Politik	-	7	-	7
Pejabat di DPR RI (Non Partisan)	-	1	-	1
Tokoh Partai Baru/Caleg Partai Peserta Pemilu Legislatif 2004	5	-	-	5
Jurnalis (Peliput Siaran Politik di DPR RI)	-	2	-	2
TOTAL	30	10	4	44

Sumber: Hasil Penelitian 2003-2004

mereka, di kafetaria, di stasiun televisi nasional sehabis mereka siaran *live* serta di lembaga tinggi negara dalam suasana santai, bersahabat dan jauh dari kesan formal. Berdasarkan pengelompokan komunikator politik di atas, maka dalam tulisan ini pengelompokan informan terbagi ke dalam kelompok komunikator politik, yaitu: politisi sebagai informan pokok atau pelaku (30 orang), informan kunci terdiri atas komunikator profesional dan pengamat politik (10 orang), ditambah dengan aktivis (4 orang). Hasil wawancara tersebut, ditunjang data fisik dan rekaman kegiatan selama proses pesan-pesan politik dipertukarkan selanjutnya

dianalisis. Konfirmasi intersubjektif dilakukan dengan para informan, sementara analisis dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Pengumpulan data berlangsung selama 18 bulan sejak dimulainya penelitian sampai menjelang proses penetapan daftar calon anggota legislatif pemilu 2004. Penelitian terus dilakukan selama pengolahan dan analisis data, hingga menjelang proses pemilu legislatif dan pemilu Presiden putaran pertama 2004. Hal ini dilakukan guna terus menggali data penelitian dan melakukan konfirmasi untuk mencapai kesepakatan intersubjektif dengan semua informan penelitian ini. Sehingga data yang dianalisis tidak basi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menggali Data tentang Politisi DPR

Teknik penelitian ini terutama adalah observasi dan wawancara. Observasi partisipan secara terbatas dilakukan sebelum dan pada saat mengumpulkan data. Dalam pengamatan ini peneliti melakukan pencatatan secara sistematis mengenai aktivitas DPR. Di pihak lain, penggunaan bahasa dan lambang – lambang dalam pertukaran pesan-pesan politik oleh politisi di DPR menjadi objek verbal dan nonverbal yang juga termasuk dalam pengamatan sebelum dan sepanjang penelitian.

Sebuah prosedur dalam pengamatan berperanserta yang dikenal dengan prosedur ‘Mencuri-dengar’ (*Eavesdropping*) dan ‘Pelacak’ (*tracer*) juga peneliti lakukan untuk memperoleh data penelitian. Mulyana (2001:178) mengemukakan:

‘Mencuri dengar’ bersifat alamiah; peneliti tidak perlu selalu meminta informasi-informasi diberikan ketika subjek menyadari kehadiran peneliti atau tidak. Bahkan secara kebetulan mendengarkan hasil pembicaraan telepon pun merupakan hasil temuan penting. Dalam artian ini mendengarkan suara yang tidak diminta sama fungsinya dengan menyaksikan adegan kegiatan yang berlangsung. Sedangkan

'pelacak' mengikuti seseorang dalam melakukan serangkaian aktivitas normalnya selama periode waktu tertentu, beberapa jam atau beberapa hari. Dengan mengikuti dan merekam apa yang berlangsung dalam dunia sosial subjek penelitian, data yang diperoleh lewat cara itu dapat melengkapi data yang diperoleh lewat wawancara mendalam.

Selama observasi partisipan peneliti juga melakukan *entri*. Menurut Baker (1994:246): "*Entri* perlu dilakukan untuk menempatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian ke dalam situasi, yang dalam peranannya peneliti menjadi orang luar dari situasi di mana objek penelitian berada". *Entri* dilakukan dengan: Pemanfaatan situasi di luar gedung dewan, memanfaatkan kunjungan secara spontan ke lembaga atau parpol di mana politisi menjadi anggotanya, dan memanfaatkan situasi di lingkungan resmi politisi yang menjadi anggota dewan.

Menurut Alwasilah (2002:144) *entri* dalam literatur kualitatif di kenal dengan *gaining entry* atau *establishing rapport* diidentikkan dengan: "*Kulo nuwun* terhadap lokasi penelitian dan silaturahmi kepada responden...Fungsi semuanya ini adalah negosiasi terhadap objek yang diteliti". Karena itu kehadiran peneliti di induk partai, ruang bebas politik, berkenalan dan memperkenalkan diri membuat jarak psikologis peneliti dan subjek serta objek juga menjadi cair. *Rapport* menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* (1881:949) adalah:

Relation marked by harmony, comformity, accord, or affinity; yaitu hubungan yang ditandai dengan kesesuaian, kesepakatan, persetujuan dan kedekatan antara peneliti dan yang diteliti. Ini menjadi penting karena peneliti adalah instrumen penelitian dan tanpa hubungan ini penelitian tidak mungkin terlaksana (Alwasilah, 2002:144).

Rapport tidaklah sama dengan *friendship* (persahabatan) karena umumnya persahabatan bersifat dua-arah dan simetris yang bersandar pada prinsip untuk saling menyukai di antara

dua orang yang berhubungan. Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah *rapport*, dan bukan *over rapport* yang cenderung mengarah kepada *friendship*. *Rapport* lebih mengarah pada hubungan yang bersifat asimetris, yakni adanya manipulasi atau kontrol dari peneliti untuk terus-menerus mengupayakan adanya kepercayaan. *Rapport* adalah kepercayaan dan kepercayaan adalah visi untuk memasuki dunia responden agar ia mau mengungkapkan kepada peneliti dengan perasaan nyaman untuk semua informasi yang diperlukan (Alwasilah, 2002:144-145).

Untuk melengkapi hasil observasi, peneliti melakukan penelusuran informasi melalui simpul-simpul jaringan yang bermanfaat dalam penelitian ini, karena pengalaman dari politisi yang berbeda dalam hal pemahaman dan pengalamannya terhadap fenomena penelitian akan memberikan informasi yang berbeda pula. Jaringan yang memberikan informasinya meliputi NGO seperti *Parliament Watch*, Kontras, Humanika dan sejenisnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tak terstruktur, tetapi mendalam dan dalam suasana terbuka, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1993:177) bahwa:

Cara terbaik memulai wawancara ialah mengajukan pertanyaan kepada subjek mengenai masalah-masalah yang menarik perhatiannya. Yang memungkinkan untuk diteruskan menjadi diskusi mendalam. Biarkan subjek memulai dari sana ... Ciptakan suasana yang membawa keterbukaan dan kesenangan pada subjek agar mau berbicara secara terbuka dan leluasa.

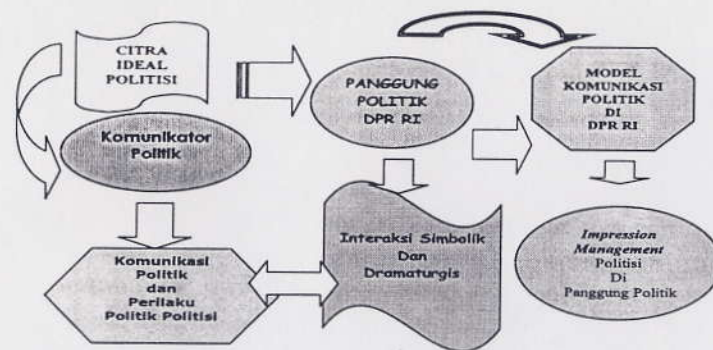
Pedoman wawancara dibuat sespesifik mungkin agar informasi dapat digali sebanyak-banyaknya dari semua informan yang menjadi subjek penelitian ini, tetapi dengan menciptakan suasana bahwa subjek tidak tengah diwawancarai.

Mengurai Temuan di Panggung Politik

Subjek penelitian ini adalah politisi sebagai manusia, yang dinamis, artikulatif, lincah, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Maka analisis yang menjamin asumsi itu tidak bisa tidak haruslah menggunakan analisis kualitatif.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus selama proses penelitian. Penelitian, membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, partisi dan menulis dan bahkan terus dilakukan sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun. Penyajian data dilakukan antara lain dengan bentuk jaringan, tabel dan bagan. Menurut Miles dan Huberman (1992:18): "dengan cara itu peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan secara benar atautkah terus melangkah melakukan analisis".

Figur 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sejak pengumpulan data, analisis kualitatif dilakukan untuk mencari 'arti' benda-benda, *setting*, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan membangun proposisi berdasarkan kesepakatan intersubjektif

dengan informan. Semua itu dimaksudkan untuk membangun wawasan umum yang disebut 'analisis'. Model analisis data tersebut jika digambarkan seperti tampak pada figur 1.

Realitas Panggung Politik DPR RI

Reformasi telah mengantarkan politisi DPR RI ke dalam situasi yang berbeda dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Hingar bingar panggung politik telah menempatkan mereka ke dalam suasana *legislative heavy* yang tidak pernah ada sebelumnya. DPR RI periode 1999-2004 memiliki posisi tawar yang jauh lebih dominan daripada lembaga eksekutif, juga daripada DPR RI periode sebelumnya yang posisinya secara *de facto* tidak sekuat lembaga eksekutif. Maka tidak hanya masyarakat yang mengalami euforia reformasi, tetapi politisi juga menikmati suasana itu. Publik pun terkejut menyaksikan penampilan perdana politisi di panggung depan menjelang pembentukan fraksi utusan daerah yang berakhir ricuh. Itu adalah babak pertama bagaimana suasana kekerasan di panggung politik depan tersajikan ke publik secara transparan. Kemudian peristiwa demi peristiwa penyampaian pesan politik yang sarat-kekerasan lainnya juga disajikan ke publik.

Sebagian besar anggota DPR RI periode 1999-2004 ternyata telah menduduki kursi DPR sejak tahun 1997. Mereka mengalami suasana reformasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto serta masa-masa penuh ketegangan menjelang lengsernya Gus Dur. Ini adalah dua masa yang sarat-perdebatan dan sarat-kekerasan, namun tetap memiliki muatan politik.

Penelitian ini menemukan antara lain dua proposisi setelah peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para informan pokok dan melakukan pengamatan berperan serta di DPR RI atas sepek terjang mereka sebagai konsekuensi dari pergeseran politik yang memungkinkan mereka melakukan peran politiknya secara lebih nyata di DPR RI. Dua proposisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Komunikasi politik para anggota DPR kental dengan pengelolaan kesan (*impression management*). Namun terdapat sedikit kekacauan konsepsi tentang panggung pada panggung politik. Peristiwa yang seharusnya terjadi di panggung belakang bisa terjadi di panggung depan, atau sebaliknya. Ditemukan pula panggung tengah yang menjadi ajang kompromi politik, yang berada di luar dan atau mengantarai dua panggung tersebut.
- Ciri atau karakteristik individual politisi lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku politik dan *impression management* politisi di DPR RI daripada karakteristik partai politik yang mereka wakili.

Kekacauan Panggung Politik

Panggung politik DPR RI diisi oleh politisi yang berasal dari beragam partai. Jumlahnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan DPR pada masa sebelumnya yang menjadikan para politisi seperti berdiri di atas menara gading. Saat itu nyaris tidak ada perbedaan model perilaku yang mencolok antara satu politisi dengan politisi lainnya. Perilaku mereka nyaris seragam ketika berada di panggung depan. Namun reformasi telah mengubah segalanya. Panggung politik yang peneliti amati belakangan tampak berbeda, dan kini menjadi lahan yang sarat dengan fenomena politik yang dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Para aktor politik sebagai pemain benar-benar menjadikan panggung sebagai pentas skenario politik yang justru seringkali melenceng dari skenario panggung belakang. Hal ini memberi isi pada proses berdemokrasi yang juga menjadi lebih bervariasi seperti bervariasinya partai politik yang mengantarkan kadernya menjadi politisi.

Meskipun politisi dari PDI-P dominan dari segi jumlah, ternyata politisi Golkar tetap dominan mewarnai panggung politik. Mungkin karena senioritas dan pengalaman politik mereka cukup banyak, maka orang seperti Chairudin, Matsani, Mubin, Jahir dan Mukrin (nama samaran) dan

beberapa politisi lainnya sering menjadi juru bicara fraksi atau komisi di media. Kadangkala muncul juga Aditya dan Humai dari Fraksi PBB, Sulaiman dan Eldorado dari PKB dan Gunadi atau Fernando dari PDI-P (semuanya juga adalah nama samaran).

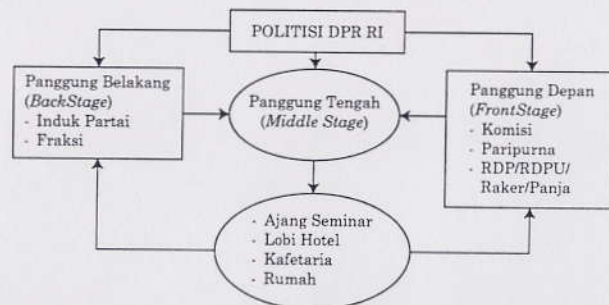
Berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat hampir semua politisi tampil 'keren' baik yang tua apalagi yang muda di panggung depan juga di panggung belakang. Busana lengkap menjadi simbol *front stage* yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan simbol lainnya. Pada umumnya mereka mengenakan lencana keanggotaan DPR dalam acara-acara resmi. Gaya bicara yang dikemas di panggung depan pada rapat fraksi, komisi dan paripurna memperlihatkan proses pencitraan yang sengaja diidealisasikan dan dibungkus dalam suasana yang sangat formal. Bahkan beberapa di antara politisi DPR pernah peneliti pegoki tetap mengenakan lencana DPR meskipun pada hari libur. Artinya, apa yang dikenakan baik busana maupun aksesoris lainnya seperti menjadi simbol yang sangat dibanggakan oleh sebagian besar anggota dewan. Busana dan aksesoris itu menjadi simbol *front stage* yang terbawa ke *back stage* dalam konteks komunikasi politik di DPR, meskipun pemakaian lencana itu di luar aktivitas politik resmi, sang politisi sebenarnya tetap melakukan pengelolaan kesan, hanya saja dengan khlayak yang berbeda. Dengan demikian, sang politisi tetap ingin menunjukkan status terhormat di luar arena politik yang resmi, bahkan terhadap orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan hal itu atau karena keluguannya sekadar tidak tahu bahwa lencana yang dipakai sang politisi adalah lencana anggota DPR.

Di panggung belakang, sesekali peneliti memergoki beberapa politisi menerima tamu-tamu perempuan 'nan cantik' di ruang kerja mereka. Tamu-tamu perempuan itu berpakaian lumayan minim dan ber-*make-up* sedikit berlebihan dan para politisi itu sangat ramah menerima mereka. Tampak pula beberapa aktivis dari berbagai organisasi massa dan pemuda

yang menemui politisi dengan membawa map permintaan sumbangan kegiatan kepada politisi.

Dalam penelitian ini, ditemukan sebuah panggung lain yang peneliti sebut panggung tengah (*middle stage*) bagi politisi, sebuah panggung lain di luar panggung politik resmi saat politisi mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya, yakni panggung depan (*front stage*) saat mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar panggung belakang (*back stage*) saat mereka mempersiapkan pesan-pesan politiknya. Panggung tengah itu, misalnya di ruang seminar, lobi hotel, kafe, toilet gedung DPR, atau bahkan rumah dinas/pribadi politisi, menjadi ajang kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Pada panggung tengah ini pula politisi 'memainkan peran politik' mereka untuk tujuan-tujuan yang tidak berkaitan langsung dengan peran politik mereka yang resmi, namun pada dasarnya menguntungkan mereka, baik secara finansial ataupun secara sosial. Para pemain lain, meskipun sebagai 'figuran' dalam panggung ini adalah pengusaha atau wartawan yang dapat memenuhi kepentingan (pribadi) mereka, misalnya untuk mendapatkan proyek atau diberitakan oleh media massa.

Figur 2. Model Panggung Politik Politisi DPR RI 1999-2004



Sumber: Hasil Penelitian 2003-2004

Melalui model di atas peneliti ingin menjelaskan model panggung politik bagi para politisi DPR RI 1999-2004 yang

memungkinkan mereka 'bermain' di tiga arena panggung tadi, baik dalam kapasitas dan kapabilitas mereka sebagai politisi maupun sebagai pribadi yang kebetulan menyandang atribut dan simbol sebagai politisi.

Panggung depan (*back stage*) jika dilihat berdasarkan perspektif dramaturgis Goffman, selayaknya menjadi panggung pertunjukan bagi para politisi untuk melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) atas citra dirinya yang bisa memukau (tetapi bisa juga menjengkelkan atau bahkan memuakkan) bagi para penontonnya. Ada kesan bahwa panggung itu ternyata dimaknai secara beragam oleh politisi yang beragam pula. Bagi sebagian dari mereka, panggung depan sepertinya menjadi panggung belakang atau menjadi panggung depan yang sekaligus panggung belakang seperti terlihat pada saat mereka gontok-gontokan secara fisik di ruang sidang yang seharusnya mereka tampilkan sebagai panggung depan yang dapat diamati dan diapresiasi oleh penonton baik secara langsung maupun tidak langsung, lewat televisi misalnya, sementara panggung tengah adalah wilayah yang bisa jadi diamati dan diapresiasi oleh khalayak tetapi bisa juga tidak. Sedangkan panggung belakang adalah wilayah yang layaknya steril dari penonton, tempat politisi awalnya menggagas ide dan intuisi politik dalam menerjemahkan peran yang disandang oleh mereka.

Berdasarkan penelitian, panggung-panggung ini menjadi agak kacau ketika bersentuhan dengan bagaimana pesan-pesan politik dikomunikasikan oleh pelakunya dan untuk kepentingan apa. Mengkomunikasikan pesan politik sesuai dengan etika dan norma yang berlaku umum adalah sebuah proses panjang, tidak lepas dari sisi baik dan buruk pengalaman politik maupun tuntutan politik yang harus diperjuangkan oleh politisi. Demikian juga ketika mereka harus berbeda pendapat di dalam fraksi maupun komisi meskipun berasal dari partai yang sama. Seringkali dalam dunia politik yang lebih kental dengan *impression management*, panggung belakang seorang politisi atau suatu tim adalah panggung

depan bagi politisi lain atau sebaliknya. Seringkali, satu fraksi atau komisi bisa satu pendapat tetapi juga bisa berbeda pendapat. Perbedaan itu melahirkan perbedaan persepsi tentang apa yang dikomunikasikan termasuk sikap politik dan bahkan perilaku politik pada setiap politisi.

Melihat aktivitas politik di DPR RI adalah sebuah kesempatan yang mengasyikkan. Jadwal sidang komisi, fraksi maupun rapat dengar pendapat komisi-komisi di DPR dengan pemerintah yang kadangkala dilakukan serentak di berbagai komisi dengan mitra kerjanya masing-masing, cukup menjadi kendala bagi peneliti untuk mengikuti kegiatan sidang yang satu dengan tuntas guna mengejar sidang lainnya. Kemudahan yang diberikan sekretariat DPR RI pun dengan memberi kartu khusus bebas keluar masuk arena gedung dan ruang sidang tidak sertamerta dapat digunakan secara maksimal untuk mengamati semua kegiatan di mana komunikasi politik terjadi di DPR.

Aktivitas politisi yang melibatkan proses komunikasi politik yang paling menarik untuk diamati adalah proses rapat dengar pendapat di panggung depan antara komisi dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Momen ini diamati sebagai proses komunikasi politik sejalan dengan pemikiran Greber (1981) bahwa apa yang membuat bahasa verbal dan nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosakatanya melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, *setting* di mana informasi disebar dan karena fungsi yang dijalankan.

Berkaitan dengan hal itulah maka peneliti mengasumsikan bahwa hampir semua pertukaran pesan yang dilakukan di DPR RI baik oleh dan untuk politisi di DPR maupun pemerintah, dan masyarakat yang dilakukan di DPR RI merupakan pertukaran pesan politik. Misalnya rapat dengar pendapat antara Komisi V yang sesungguhnya membidangi masalah industri, perdagangan dan koperasi dengan Jamsostek, tetapi arah komunikasi menyebar ke arah politis bukan karena menggunakan kosa kata politis, melainkan karena substansi informasi yang disebar,

yang kemudian dianggap menyalahi aturan oleh seorang anggota yang berasal dari satu komisi dan kemudian memicu pertengkaran. Lucunya, pertengkaran itu terjadi antara sesama politisi yang melakukan dengar pendapat bukan antara politisi dengan pemerintah. Inilah contoh yang menunjukkan agak kacau-nya panggung depan dan panggung belakang.

Di sisi lain, ada panggung depan yang memang sesuai dengan panggung depan ala Goffman. Sebagai ilustrasi, sejumlah kewenangan yang dimiliki politisi sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai anggota MPR RI saat itu memberikan status kepada mereka sebagai penyeleksi bagi sejumlah jabatan dan kedudukan penting di Tanah Air. Kewenangan ini menjadikan mereka sebagai orang yang 'lebih tahu, lebih hebat dan lebih berkuasa' untuk menempatkan figur tertentu dalam jabatan tertentu pula. Melihat proses seleksi untuk menjadi anggota komisi konstitusi misalnya, secara bercanda seorang pakar hukum ternama dari Universitas Padjadjaran yang kebetulan ikut dalam seleksi itu menyatakan: "Saya seperti tengah menghadapi ujian disertasi saja di forum ini". Ungkapan ini mengisyaratkan betapa berkuasanya para penyeleksi yang bertindak sebagai penguji. Beberapa orang di antara para penyeleksi jika dilihat dari pendidikan dibandingkan dengan yang diseleksi sebenarnya sangat tidak memadai untuk menjadi orang yang menyeleksi. Sebenarnya, sebagaimana yang peneliti amati, terdapat banyak pertemuan lain yang dilakukan oleh politisi DPR dengan mitra kerja mereka yang dikemas politisi dengan bahasa verbal dan nonverbal yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan bahwa politisi adalah hakim yang menganggap mitra kerjanya sebagai terdakwa.

Kehadiran peneliti dalam sidang yang satu ke sidang yang lain dengan jarak ruang yang kadang tidaklah berdekatan memberi ruang pengamatan yang berlebih pada peneliti. Dalam rentang waktu yang sebetulnya tidak terlalu panjang dapat disaksikan bagaimana politisi yang satu dan yang lainnya memanfaatkan waktu di sela-sela sidang untuk

bercengkerama dengan wartawan yang memang banyak berkeliaran di gedung DPR. (Inilah salah satu contoh panggung tengah). Sekali waktu peneliti menyaksikan seorang politisi menyelipkan sesuatu ke tangan seorang wartawan dan ternyata uang. Bahkan ada seorang wartawan yang mengikuti sang politisi ke kamar kecil untuk kemudian tergopoh-gopoh keluar lagi sambil menyelipkan sesuatu ke saku celananya. "Bapak itu baik sekali", kata sang wartawan sambil tersenyum kepada peneliti. Beberapa wartawan yang sama-sama sering nongkrong di DPR dengan peneliti memang sangat akrab dengan peneliti. Dalam pengamatan peneliti kebanyakan politisi yang dekat dengan wartawan seringkali muncul di media cetak maupun elektronik.

Panggung belakang, juga kadang berfungsi sebagai panggung tengah, tidak kalah hingar bingar dan juga menarik untuk diamati. Suasana kafetaria Gedung Nusantara I sangat ramai dikunjungi tidak hanya oleh politisi yang melepas hajat makan siang, tetapi para pengusaha berdasari menjadikan arena itu juga sebagai ruang lobi politik dengan politisi. Seorang pengusaha daerah yang kebetulan peneliti kenal mempertegas asumsi itu: "Saya menemui Bapak Anu untuk menggolkan rencana kami dalam hal investasi di daerah", katanya sambil menyebut nama seorang politisi dari daerah pemilihan tertentu.

Latar Belakang Kepartaian dan Faktor Individual Politisi

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sikap dan perilaku politik tertentu di antara individu-individu politisi yang berasal dari partai politik berbeda termasuk dalam melakukan komunikasi politik dan pengelolaan kesan mereka di panggung politik. Inilah salah satu proposisi yang berhasil dibangun dalam penelitian ini. Artinya memang tidak ada perbedaan yang cukup meyakinkan bahwa seorang politisi yang berasal dari partai politik yang memiliki *platform* partai tertentu akan cenderung berbeda dengan politisi dari partai lain yang memiliki *platform* partai berbeda.

Sebagian besar informan (baik informan pokok maupun informan kunci) menyatakan bahwa penyampaian pesan-pesan politik di DPR RI yang dilakukan oleh politisi bergantung pada latar belakang individu dan pengalaman politik politisi itu sendiri dan tidak terkait dengan latar belakang kepartaian mereka. Kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, yang juga ditandai dengan kekerasan verbal dan kekerasan fisik, dilakukan oleh politisi yang berasal dari partai politik mana pun: Golkar, PDI-P, PAN, PKB atau partai lain yang bukan partai besar di DPR, meskipun sebelumnya ada kecenderungan opini yang terbentuk di tengah masyarakat bahwa politisi PDI-P lah yang potensial melakukan kekerasan dalam komunikasi politik.

Berdasarkan indikasi perilaku tertentu, misalnya dalam kekerasan pertukaran pesan politik di DPR, pemaksaan atas perilaku tersebut oleh politisi sebagai pelakunya, yang kemudian dikonfirmasi dengan subjek penelitian (baik informan pokok ataupun informan kunci), ternyata tidak ada kaitan yang signifikan antara kekerasan politik dengan latar belakang kepartaian pelakunya. Menurut mereka, kapasitas dan karakteristik individu yang lebih memungkinkan pelakunya menampilkan perilaku tersebut, seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2. Latar Belakang Kepartaian dan Kekerasan dalam Komunikasi Politik

KEKERASAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK	KOMUNIKATOR POLITIK			TOTAL
	POLITISI	PROFESIONAL	AKTIVIS	
<i>Background</i> Kepartaian	10	2	-	12
<i>Background Individual</i> politisi	20	8	2	30
<i>Background</i> Kepartaian dan individual politisi	-	-	2	2
TOTAL	30	10	4	44

Sumber: Hasil Penelitian 2003-2004

dilihat perbedaan yang nyaris seragam bahwa kebanyakan politisi tampil lebih memukau setelah menjadi anggota parlemen, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada juga satu dua orang politisi yang sampai akhir keanggotaannya di DPR tetap menggunakan angkutan umum dan *scooter* antiknya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sungkono yang sebelumnya adalah bendahara di salah satu fraksi terbesar di DPR, dapat diketahui bahwa idealisme yang digembargemborkan oleh seorang politisi ketika ia berjuang merebut suara konstituennya sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi setelah berhasil menduduki kursi legislatif. Sungkono mengungkapkan:

Saya adalah orang yang kritis ketika masuk DPR karena komitmen saya, tapi kemudian saya menjadi muak karena ternyata teman-teman saya yang politisi korup semua. Pada rapat pertama di fraksi saja sudah ada yang minta naik gaji dari Rp 5,4 juta lebih menjadi Rp 11 juta lebih. Ternyata hal ini tidak hanya terjadi di fraksi saya. Hampir semua politisi di semua partai minta naik gaji, belum lagi ditambah dengan amplop lain (Wawancara dengan Sungkono, politisi DPR RI nonaktif, September 2003).

Apa yang diungkapkan Sungkono kemudian menjadi bagian dari sejumlah sorotan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap DPR. Terlepas dari kinerja seperti apa yang mereka lakukan ternyata juga bahwa permintaan kenaikan gaji itu terkabulkan. Artinya tentu hal itu dapat terjadi karena memang mayoritas anggota dari hampir semua fraksi mengusulkan hal itu. Seperti yang disesalkan Sungkono, identitas partai wong cilik pun bahkan menjadi hilang karena yang ada adalah, bagaimana kepentingan pribadi anggota partai terealisasikan selama dan semasa keanggotaan di DPR. Tidak hanya gaji yang meningkat, bahkan Gunadi seorang anggota fraksi terbesar di DPR juga mengungkapkan:

Penerimaan amplop-amplop sangat sulit dibuktikan, tetapi bisa dirasakan. Ketika saya menolak menerima amplop saya dikatakan sok suci, sok alim dan sebagainya. Ini sudah menjadi fenomena di DPR. Saya bahkan pernah ditawarkan oleh seorang wakil di DPR sejumlah dua puluh milyar tapi langsung saya tolak. Politisi seharusnya tidak pernah boleh merasa dirinya sebagai elit politik, sehingga setelah menjadi anggota DPR harus mengganti mobilnya dengan Jaguar, Mercy, BMW, dsb. Kenyataannya, baru tiga tahun menjadi anggota DPR penampilan berubah total, kalau tidak memakai jas merasa dirinya bukan anggota DPR. (Wawancara dengan Gunadi, politisi DPR RI, September 2003).

Apa yang diungkapkan Gunadi tersajikan jelas ketika peneliti menyusuri hamparan parkir di lingkungan DPR/MPR. Hampir semua lahan parkir terisi oleh jajaran mobil mewah keluaran tahun terbaru. Sangat sulit menemukan mobil keluaran tahun 2000 ke bawah. Barangkali jika lahan parkir di luar gedung masih menunjukkan bercampurnya kendaraan politisi dengan tamu yang hadir ke DPR, maka lahan parkir di bawah gedung DPR dan parkir khusus anggota dewan adalah saksi lain yang tidak terbantahkan.

Peneliti juga menyaksikan lalu lalang mobil yang menaik dan menurunkan anggota DPR baik di teras gedung Nusantara I, Nusantara II, dan Nusantara III, yang jelas menunjukkan kepemilikan pribadi anggota dewan terhadap mobil yang dinaikinya. Kalaupun ada beberapa taksi yang menurunkan penumpangnya di antara jajaran gedung DPR, tampak bahwa yang diturunkan bukanlah anggota dewan. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan cara menanyakan kepada Pamdal (Pengamanan Dalam) sejenis satpamnya di DPR, apakah yang turun itu anggota dewan dan dijawabnya tidak. Lebih-lebih memang yang turun itu juga tidak mengenakan lencana keanggotaan

DPR yang biasanya tidak pernah lepas dikenakan oleh para anggota dewan.

Peningkatan taraf hidup secara material yang kemudian menyertai sebagian besar anggota dewan juga dapat dilihat dari fasilitas yang mereka miliki. Setelah melakukan wawancara dan menyaksikan serta mengamati proses komunikasi politik di DPR selama seharian penuh, menjelang magrib peneliti bermaksud pulang. Di ujung gedung Nusantara I peneliti berpapasan dengan Fernando. Ia adalah informan yang pertama kali peneliti wawancarai di DPR. Ia menanyakan arah pulang peneliti dan ketika peneliti menyebut arah tertentu, ia mengajak pulang bersama karena ia juga menuju arah yang sama. Merasa ini adalah sebuah kesempatan lain untuk mengetahui kapasitas Fernando secara pribadi, peneliti menerima ajakan itu. Mobil politisi bermerek Toyota Kijang Krista keluaran tahun 2003 tersebut dikemudikan sopirnya.

Di suatu tempat Fernando menyelesaikan suatu urusan, sementara sopirnya yang telah bekerja lebih dari tiga tahun itu mengantarkan peneliti pulang ke tempat peneliti mondok. Peneliti pun lalu memancing sopir Fernando untuk mengungkapkan lebih jauh siapa Fernando. Ternyata ia seorang bujangan alias lajang belum menikah, tinggal di komplek DPR RI dan memiliki dua mobil keluaran terbaru selain mobil yang kami naiki tadi. Kedua mobil tersebut dibeli setelah ia menjadi anggota DPR. Sebelumnya ia hanya menaiki taksi saat ingin bertugas ke Senayan. Kisah Fernando adalah kisah sukses materi seorang anggota DPR. Banyak kisah sukses lain yang kemudian peneliti temukan sepanjang penelitian untuk membedah dunia simbolik politisi di DPR.

Suatu ketika, selesai shalat zuhur di gedung DPR RI, peneliti bermaksud menemui seorang teman yang berkantor di jalan Gatot Subroto Jakarta. Ketika peneliti tengah menunggu taksi di seberang gedung Nusantara I, sebuah mobil KIA Carens keluaran terbaru berhenti di depan peneliti. Kaca mobil terbuka dan Sulaiman salah seorang anggota DPR yang pernah peneliti wawancarai tersenyum

sambil bertanya ke arah mana tujuan peneliti. Ketika peneliti menyebut sebuah arah, ternyata ia juga bermaksud melewati jalan itu dan ia mengajak bareng. Sekali lagi untuk mengetahui dunia lain dari informan yang juga pernah peneliti wawancarai ini, peneliti ikut di mobilnya. Sambil bergurau peneliti bertanya: "Mobil baru ya, Mas?" Ia tersenyum. Peneliti melanjutkan, "Cocok sekali warna mobil ini dengan baju dan jas yang Mas kenakan", ujar peneliti memancing. Maksudnya untuk memancing apakah jika ia memakai baju warna lain ia juga akan memakai mobil lain pula yang berwarna senada dengan bajunya. Di luar dugaan, entah bergurau atau tidak, Sulaiman menjawab: "Bener ya, pas dengan baju ini?" jawabnya. Ia melanjutkan, "Aku keren nggak pakai jas warna ini?" Tentu saja peneliti tidak punya pilihan jawaban kecuali mengatakan "Keren, pas, *matching* dan gaya" kepadanya. Peneliti bertanya juga apakah istrinya kalau bepergian menggunakan mobil yang sama. Ia menjawab bahwa ada satu mobil lain yang khusus digunakan oleh istrinya. Berarti Sulaiman punya dua mobil yang juga menurutnya dibeli setelah ia menjadi anggota DPR.

Sementara itu, Mukrin yang ternyata seorang alumni Pascasarjana sebuah universitas negeri di Bandung, juga telah meraih kesuksesan serupa setelah ia menjadi anggota DPR. Dalam rapat paripurna menjelang pidato kenegaraan Presiden Megawati tanggal 16 agustus 2003 peneliti mendapat undangan khusus untuk mengikuti pidato kenegaraan itu. Dalam kesempatan itu peneliti menyerahkan *form* kepada Mukrin sembari meminta waktu untuk ngobrol dengannya. Ia menyanggupi bahwa setelah paripurna ia dapat menerima peneliti di ruang kerjanya.

Selesai sidang paripurna peneliti melihat Mukrin keluar ruangan. Peneliti menyusulnya dari belakang. Persis di depan Gedung Nusantara III ia mendekati sebuah mobil BMW mengkilat dan mengambil sesuatu di dalamnya. Kemudian beriringan peneliti dan Mukrin menuju ruang kerjanya. Peneliti sempat bertanya apakah itu mobilnya. Ia menjawab

bangga mengungkapkan, "Kata orang, dari 500 anggota DPR hanya beberapa orang saja yang sering berdialog ke bawah. Dari yang sedikit itu adalah saya.....dari PKB ada 51 orang di DPR dan di antara yang 51 orang itu yang sering muncul adalah saya".

Kebanggaan Eldorado cukup beralasan karena memang ia seringkali tampil di panggung politik terutama di wilayah depan meskipun kadangkala secara verbal ungkapan politiknya seringkali dianggap kasar dan tindakan serta bahasa tubuhnya juga dianggap mengandung muatan kekerasan. Ia kemudian belajar dari pengalaman. Terakhir jika diamati, Eldorado telah berubah dalam penampilan politiknya. Ia seperti tengah memamerkan proses pembelajaran politik yang dianggapnya telah mampu mengubahnya menjadi tersenyum dalam marah.

Proses komunikasi politik di DPR dapat saja mengubah politisi santun menjadi politisi garang atau malah mengubah politisi garang menjadi politisi yang piawai mengkomunikasikan pesan politiknya. Entah karena kepiawaian itu pula beberapa politisi yang menjadi informan penelitian ini akhirnya berhasil kembali ke Senayan melalui prosesi pemilu legislatif 2004.

Hal paling menarik untuk diamati selama masa keanggotaan DPR RI 1999-2004 adalah tidak dominannya 'koor' setuju yang dinyanyikan politisi dalam setiap pengambilan keputusan politik meskipun sekali dua masih terlihat wajah terkantuk-kantuk ditutupi koran ketika rapat digelar. Sebagian besar politisi cukup aktif menggagas ide dan pemikiran meskipun kadang terasa tidak kontekstual.

Masalah lain adalah ketidakhadiran politisi dalam sidang tertentu dengan alasan yang tidak jelas. Meskipun mereka mengungkapkan bahwa ada tugas kunjungan kerja yang juga sama pentingnya seperti sidang atau rapat di DPR. Apa pun masalahnya, ketidakhadiran dalam rapat yang digelar paling tidak telah menghilangkan sebuah kesempatan untuk menampilkan ide dan pemikiran mereka melalui komunikasi politik. Padahal harus diakui bahwa, ada hubungan yang erat

antara komunikasi dan pencapaian sasaran politik seperti yang juga diakui oleh Greber (1981:23) bahwa:

Sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata, politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik. Selain itu juga tergantung pada efektivitas komunikasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Saat menjalankan kegiatan sehari-hari, politisi melakukan manipulasi diri. Menurut pengamatan peneliti manipulasi diri politisi sangat kental terjadi di panggung depan, baik pada rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat dan rapat gabungan. Sedangkan dalam rapat yang digelar di fraksi, dan rapat di induk partai yang merupakan panggung belakang, politisi seringkali menampilkan sosok diri yang tidak sepenuhnya diidealisasikan. Hal ini boleh jadi karena fraksi dan partai terdiri dari mereka yang dianggap memiliki kepentingan yang sama, komitmen yang sama dan *platform* partai yang diusung pun sama, sehingga manipulasi diri tidak menonjol.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahkan ketika politisi berada di wilayah tengah, manipulasi diri dapat terjadi jauh lebih kental dibandingkan dengan di wilayah depan, tetapi tentu saja untuk tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, panggung tengah ini berubah menjadi panggung depan dengan penonton yang berbeda pula.

Bahkan ketika peneliti sekali waktu berada di ruangan kerja politisi sambil menunggu waktu wawancara, ada juga beberapa pengusaha yang ingin menghadap politisi tersebut. Ini menunjukkan bahwa panggung belakang juga bisa tiba-tiba berubah menjadi panggung tengah dalam penelitian ini. Pergeseran-pergeseran panggung ini mungkin merupakan tema menarik yang dapat dieksplorasi lebih mendalam, sehingga dapat diketahui bagaimana kelompok yang

manggung di DPR melakukan komunikasi politik. Bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok yang mungkin dimanipulasi sedemikian rupa dan dibungkus dengan nama idealisme atau kepentingan rakyat. Wajah panggung politik DPR RI 1999-2004 dapat digambarkan pada figur 4.

Figur 4 Panggung Politik DPR RI 1999-2004



Sumber: Hasil Penelitian 2003-2004

Suasana reformasi pula yang kemudian menjadikan gedung Nusantara I sebagai pusat segala aktivitas politik menjadi lebih terbuka. Pesan-pesan politik mengalir, bergilir, beruntun, dan menyeruak disampaikan oleh individu, kelompok dan berbagai lapisan masyarakat yang merasa bahwa aspirasi mereka akan didengarkan langsung jika disuarakan ke pusat pengambilan keputusan politik. Politisi pun bak selebritis menjadi pusat perhatian. Sepak terjangnya dihitung, diamati dan bahkan dikritik. Tetapi mereka tetap berjalan sebagai politisi yang merasa bahwa mereka mempunyai posisi tawar yang jauh melebihi kapasitas individual mereka sendiri karena lembaga telah melegitimasi peran mereka.

Politisi DPR menunjukkan peran resmi mereka di panggung depan. Namun mereka juga bermain di panggung tengah dengan hitungan politik, selain di panggung belakang yang lebih alamiah.

Komunikasi politik mereka berjalan terus di tiga ranah tadi, lengkap dengan segala atribut dan komitmen yang juga sulit ditakar: individu ataukah rakyat yang mereka wakili? Yang jelas mereka terus berkomunikasi dengan interaksi dan dengan aksi diri. Mereka juga bertransaksi dan tentu saja melakukan manipulasi diri.

Jika dalam teorinya Goffman mengatakan panggung depan adalah sesuatu yang berbeda dengan panggung belakang, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada panggung politik di DPR sesuatu yang seharusnya terjadi di panggung belakang dapat muncul di panggung depan tetapi dapat juga tidak muncul di panggung depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar politisi melakukan *impression management* dalam hal ini manipulasi diri yang sangat kental dalam momen politik yang dipertukarkan dan disiarkan secara langsung. Selain itu, *front stage* pada satu politisi atau tim dapat merupakan *back stage* bagi politisi/tim lainnya. Apa yang terjadi di *back stage* dapat merupakan *front stage* bagi politisi lainnya. Alhasil, apa yang disusun sebagai skenario di panggung belakang tidak selalu muncul di panggung depan, sedangkan panggung belakang adalah wilayah yang sama sekali tidak boleh terjamah oleh mereka yang tidak terlibat dalam pementasan. Karena itu, konsep *panggung* seperti yang dinyatakan Goffman tidak sepenuhnya berlaku di panggung politik dan menjadi sedikit kacau. Sekali lagi, inilah proposisi yang peneliti temukan dalam penelitian ini. Masyarakat menyaksikan panggung depan, tetapi panggung tengah dan panggung belakang tersaji juga ke publik secara transparan.

Apa yang digagas Goffman (1959) sebagai 'Kesetiaan Dramaturgis, Disiplin dramaturgis dan Kewaspadaan dramaturgis' (di mana setiap aktor dalam suatu pementasan punya kewajiban moral untuk mendukung pelaksanaan peran, harus berpegang pada bagian yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh pertunjukan itu sendiri, dan harus menggunakan metode yang tepat untuk menyajikan pertunjukan

sesuai dengan skenario) ternyata tidak dapat berlaku mutlak di panggung politik. Dengan demikian, panggung politik memiliki warna yang berbeda dari kehidupan sehari-hari yang diibaratkan teater oleh Goffman. Sesuatu yang digagas sebagai skenario fraksi di panggung belakang boleh jadi tidak muncul di panggung depan. Maka muncullah panggung tengah untuk menghasilkan *deal* politik berdasarkan kompromi di antara dua panggung tadi. Maka kemudian politik menjadi pertemuan dua kepentingan dan dapat menjadi perbedaan dua kepentingan.

Penutup

Para aktor politik di DPR RI sangat dinamis. Mereka memiliki motif yang lebih bersifat individual dalam memainkan peran politik mereka di DPR RI bukan motif yang berkaitan dengan kepentingan partai politik yang mereka wakili, apa lagi dengan kepentingan rakyat banyak. Untuk tujuan itu, mereka kerap melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) untuk mewujudkan kepentingan mereka. Panggung politik adalah sebuah dunia yang sangat kental dengan manipulasi diri. Maka pesan politik yang sama dalam suatu fraksi, boleh jadi dimaknai berbeda oleh satu politisi dari fraksi yang sama, tetapi boleh jadi dimaknai sama oleh politisi dari fraksi yang berbeda.

Apa yang terjadi dipanggung depan (*front stage*) bagi individu atau kelompok politisi (baik dalam arti partai, fraksi, atau komisi) boleh jadi merupakan panggung belakang (*back stage*) bagi individu atau kelompok politisi lainnya atau dapat juga terjadi sebaliknya. Bagi sebagian politisi DPR, apa yang seharusnya terjadi di panggung belakang (*back stage*) ternyata terjadi di dipanggung depan (*front stage*). Pelaku komunikasi politik juga menampilkan panggung politik dengan cara yang agak berbeda dibandingkan dengan yang digagas Goffman. Dengan kata lain, konsep dramaturgi Goffman menjadi sedikit

kacau dalam dunia komunikasi politik para politisi DPR RI yang menjadi lapangan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interaction: Perspective and Method*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall.
- Bodgan, Robert dan Taylor. J. Steven. 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Penerj. A Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional,
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among the Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage.
- Denzin, Norman, K. dan Yvonna S. Lincoln, Ed. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London, New Delhi: Sage.
- Douglas, Jack D., ed. 1970. *Understanding Everyday Life: Toward Reconstruction of Sociological Knowledge*. Chicago: Aldine.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*, Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor.
- _____. 1961. *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- _____. 1963a. *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings*. New York: Free Press.
- _____. 1963b. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Kompas, 4 Februari 2003.

- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Buku I). Penerj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Lasswell Harold. 1958. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Books.
- Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self, and Society: From a Standpoint Of a Social Behaviorist*. Ed. Charled. W Morris. Chicago: University of Chicago Press
- Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack. C Robert E. Riggs dan Helenan S. Robbin. 1982. *The Dictionary of Political Analysis*. California: ABC-CLIO
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of The Social World*. London: Heinemann Educational Book.
- Suwardi, Harsono. 1995. *Diktat Komunikasi Politik*. Jakarta: Pascasarjana UI.

Manajemen Komunikasi Pengemis

Engkus Kuswarno

Latar Belakang

Jika perilaku pengemis dianggap sebagai sebuah fakta sosial, atau sebuah keniscayaan, maka berlaku suatu sebutan: pengemis adalah 'sampah masyarakat', 'manusia tertindas', 'manusia yang perlu dikasihani', 'manusia kalah', 'manusia korban kemiskinan struktural', dan sebagainya. Anggapan ini bukan sebuah kesalahan pemikiran, melainkan sebuah sudut pandang etik orang di luar pengemis untuk menunjukkan sebuah fakta yang semestinya berlaku seperti itu, bukan pandangan emik, bagaimana pengemis melihat kehidupan mereka sendiri.

Dalam pandangan emik yang bersifat interpretif atau fenomenologis, pengemis adalah subjek. Mereka adalah 'aktor kehidupan' yang memiliki hasrat, harapan dan kehidupan sendiri yang unik. Pandangan subjektif seperti ini